

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Penelitian Terdahulu

Penelitian ini masih mengacu pada penelitian-penelitian terdahulu. Hasil dari penelitian-penelitian terdahulu digunakan sebagai landasan dan pembandingan dalam penelitian saat ini.

1. Makki & Lodhi (2014)

Penelitian ini mengembangkan model struktural yang menghubungkan *GoodCorporate Governance*, efisiensi *Intelectual Capital* dan kinerja keuangan kemudian memverifikasi melalui pemodelan persamaan struktural berdasarkan *parsial least square*. Hasil penelitian ini membuktikan terdapat dampak tidak langsung dari penerapan *Corporate Governance* dengan kinerja keuangan perusahaan. Kedua, terdapat pengaruh signifikan positif antara penerapan *Corporate Governance* dengan efisiensi *Intelectual Capital*. Ketiga, terdapat pengaruh signifikan positif antara efisiensi *Intelectual Capital* dengan kinerja perusahaan.

Persamaan

Metode analisis data yang digunakan pada kedua penelitian ini menggunakan *Parsial Least Square*.

Perbedaan

Penelitian ini menggunakan tambahan variabel *Intellectual Capital*, sementara pada penelitian saat ini tidak ada variabel *Intellectual Capital*.

2. Irfan, Fachrurrozie & Handayani (2013)

Penelitian bertujuan untuk menganalisis pengaruh kinerja perusahaan terhadap penerapan *Good Corporate Governance*. Populasi dalam penelitian ini adalah perusahaan-perusahaan publik yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Sampel dalam penelitian ini adalah perusahaan yang telah berturut-turut masuk dalam pemeringkatan CGPI survey investor dan analisis yang diberikan oleh IICG untuk tahun 2010, 2011 dan 2012. Metode pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan metode *purposive sampling*. Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi berganda, analisis deskriptif dan uji asumsi klasik. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa ROA tidak berpengaruh terhadap *Corporate Governance*, ROE tidak berpengaruh terhadap *Corporate Governance* dan NPM tidak berpengaruh terhadap *Corporate Governance*.

Persamaan

Topik yang diangkat dalam penelitian ini dan saat ini adalah *Good Corporate Governance*.

Perbedaan

- 1) Variabel dependen yang digunakan dalam penelitian ini adalah *Good Corporate Governance*, sementara penelitian saat ini menggunakan kinerja perusahaan,

- 2) Variabel independen yang digunakan dalam penelitian ini adalah Kinerja Perusahaan, untuk penelitian saat ini menggunakan *Good Corporate Governance*.

3. Prasinta (2012)

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh penerapan *Good Corporate Governance* terhadap kinerja keuangan. Pengambilan sampel menggunakan teknik *purposive sampling* yaitu pemilihan sampel dengan kriteria tertentu, sehingga didapat sampel dalam penelitian ini sebanyak 31 perusahaan. Penerapan *Good Corporate Governance* diukur dengan skor CGPI. Kinerja keuangan diukur dengan *Return On Assets* (ROA), *Return On Equity* (ROE) dan Tobin's Q. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tidak terdapat hubungan positif antara *Good Corporate Governance* dengan *Return On Assets*, namun terdapat hubungan positif antara *Good Corporate Governance* dengan *Return On Equity*, dan tidak terdapat hubungan positif antara *Good Corporate Governance* dengan Tobin's Q.

Persamaan

Kinerja perusahaan dalam kedua penelitian ini diukur dengan menggunakan *Return On Assets* (ROA).

Perbedaan

Penelitian saat ini mengukur penerapan *Good Corporate Governance* menggunakan komposisi dewan komisaris independen, komite audit independen

dan kepemilikan intitusional, sementara pada peneltian ini diukur menggunakan skor CGPI.

4. Susanti & Sudantoko (2012)

Penelitian ini meneliti mengenai pengaruh penerapan *Good Corporate Governance* dalam perusahaan terhadap kinerja keuangan perusahaan. Variabel dependen yang digunakan dalam penelitian ini adalah kinerja keuangan yang dinilai dengan NPM, ROA, ROE, EPS dan Tobin's Q. Variabel independen yang digunakan adalah perusahaan peringkat 10 besar CGPI (*Corporate Governance Perception Index*) yang dinilai dengan nilai CGPI antara 1-100 yang telah diperingkat dari hasil penilaian penerapan GCG dalam perusahaan oleh IIGC. Populasi dalam penelitian ini adalah perusahaan yang mengikuti survey oleh IIGC tahun 2006-2010. Pengambilan sample menggunakan *Purposive Sampling*. Hasil penelitian ini menyatakan penerapan *Good Corporate Governance* dalam perusahaan berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan perusahaan yang diproksi dengan NPM, ROA, ROE, EPS dan Tobin's Q.

Persamaan

Kedua penelitian ini mengambil topik *Good Corporate Governance* dan kinerja perusahaan.

Perbedaan

- 1) Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah perusahaan yang mengikuti survey IIGC, sementara sampel dalam penelitian saat ini adalah perusahaan transportasi yang terdaftar di BEI,

- 2) Periode dalam penelitian ini adalah tahun 2006-2010, sementara penelitian saat ini menggunakan periode 2012-2014.

5. Dewayanto (2010)

Penelitian ini meneliti mengenai pengaruh mekanisme *Good Corporate Governance* terhadap kinerja perbankan nasional. Penelitian ini melibatkan variabel yang terdiri dari delapan variabel bebas (independen), satu variabel terikat (dependen) dan satu variabel kontrol. Variabel independen dalam penelitian ini meliputi kepemilikan pemegang saham pengendali, kepemilikan asing, kepemilikan pemerintah, ukuran dewan direksi, ukuran dewan komisaris, komisaris independen, rasio kecukupan modal, dan auditor eksternal. Variabel dependennya adalah kinerja perusahaan perbankan yang diukur oleh ROA. Sedangkan ukuran bank yang diproksikan dengan *natural logaritma asset* merupakan variabel kontrol penelitian. Hasil penelitian menunjukkan variabel kepemilikan saham pengendali tidak berpengaruh terhadap kinerja perbankan, variabel kepemilikan asing tidak berpengaruh terhadap kinerja perbankan, variabel kepemilikan pemerintah tidak berpengaruh terhadap kinerja perbankan, variabel ukuran dewan direksi tidak berpengaruh terhadap kinerja perbankan, variabel ukuran dewan komisaris berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kinerja perbankan, variabel komisaris independen berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kinerja perbankan, variabel rasio kecukupan modal berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja perbankan, variabel eksternal

auditor berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja perbankan, variabel ukuran bank berpengaruh positif yang signifikan terhadap kinerja perbankan.

Persamaan

Pengukuran *Good Corporate Governance* pada kedua penelitian ini menggunakan Dewan Komisaris Independen.

Perbedaan

Penelitian ini menggunakan sampel di perusahaan perbankan yang terdaftar di BEI, sementara pada penelitian saat ini menggunakan perusahaan transportasi yang terdaftar di BEI.

6. Renders, Gaeremynck & Sercu (2010)

Penelitian ini menguji antara penerapan *Good Corporate Governance* terhadap kinerja perusahaan. Penilaian kinerja perusahaan dalam penelitian ini menggunakan Tobin's Q, ROA dan ROE. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa perusahaan yang masuk peringkat dalam penerapan *Corporate Governance* adalah relevan dan dalam praktik perusahaan yang menerapkan *Corporate Governance* berpengaruh secara signifikan dalam meningkatkan kinerja perusahaan.

Persamaan

Variabel dependen yang digunakan dalam kedua penelitian adalah Kinerja Perusahaan dan variabel independennya adalah *Good Corporate Governance*.

Perbedaan

Sampel perusahaan yang digunakan dalam penelitian ini adalah perusahaan yang terdapat di Eropa, sementara penelitian saat ini menggunakan perusahaan yang terdapat di Indonesia.

2.2. Landasan Teori

2.2.1. Teori Keagenan

Teori keagenan (*Agency Theory*) dikembangkan pada tahun 1970-an di tulisan Jensen dan Meckling (1976) yang berjudul "*Theory of the Firm: Managerial behavior, agency costs and ownership structure*". Konsep-konsep teori keagenan dilatar belakangi oleh berbagai teori sebelumnya seperti teori konsep biaya transaksi (Coase, 1937), teori *property right* (Berle dan Means, 1932), dan filsafat utilitarisme (Ross, 1973). Teori keagenan dibangun sebagai upaya untuk memahami dan memecahkan masalah yang muncul ketika ada ketidaklengkapan informasi pada saat melakukan kontrak.

Teori keagenan menjelaskan tentang hubungan kontraktual antara pihak yang mendelegasikan pengambilan keputusan tertentu atau pemilik/pemegang saham (*principal*) dengan pihak yang menerima pendelegasian tersebut atau manajemen/direksi (*agent*). Teori keagenan memfokuskan pada penentuan kontrak yang paling efisien yang mempengaruhi hubungan prinsipal dan agen. Teori keagenan dipandang lebih luas karena teori ini dianggap lebih mencerminkan kenyataan yang ada. Berbagai pemikiran mengenai *Good Corporate Governance* dihubungkan dengan teori keagenan, dengan tata kelola perusahaan yang baik

akan berpengaruh terhadap hubungan antara pemegang saham dengan manajemen atau yang dikenal dalam teori keagenan adalah principal dan agen. *Good Corporate Governance* dipandang dapat memberikan kontribusi yang positif akan penerapan teori keagenan.

2.3. *Good Corporate Governance*

2.3.1. *Pengertian Good Corporate Governance*

Bank Dunia (*World Bank*) mendefinisikan *Good Corporate Governance* (GCG) sebagai kumpulan hukum, peraturan dan kaidah-kaidah yang wajib dipenuhi, yang dapat mendorong kinerja sumber-sumber perusahaan untuk berfungsi secara efisien guna menghasilkan nilai ekonomi jangka panjang yang berkesinambungan bagi para pemegang saham maupun masyarakat sekitar secara keseluruhan.

Lembaga *Corporate Governance* di Malaysia, *Finance Committee on Corporate Governace* (FCCG) mendefinisikan *Corporate Governance* sebagai proses dan struktur yang digunakan untuk mengarahkan dan mengelola bisnis serta aktivitas perusahaan ke arah peningkatan pertumbuhan bisnis dan akuntabilitas perusahaan.

Pasal satu Surat Keputusan Menteri BUMN No. 117/M-MBU/2002 Tanggal 31 Juli 2002 tentang penerapan GCG pada BUMN menyatakan bahwa *Corporate Governance* adalah suatu proses dan struktur yang digunakan oleh organ BUMN untuk meningkatkan keberhasilan usaha dan akuntabilitas perusahaan guna mewujudkan nilai pemegang saham dalam jangka panjang

dengan tetap memerhatikan pemangku kepentingan lainnya, berlandaskan peraturan perundangan dan nilai-nilai etika.

Secara singkat, *Good Corporate Governance* diartikan sebagai seperangkat sistem yang mengatur dan mengendalikan perusahaan untuk menciptakan nilai tambah (*value added*) bagi para pemangku kepentingan (Arief, 2009:2).

2.3.2. Prinsip-prinsip *Good Corporate Governance*

Prinsip-prinsip *Corporate Governance* yang dikembangkan oleh OECD (*Organization for Economic Co-operation and Development*) mencakup lima hal berikut ini:

1. Perlindungan terhadap hak-hak pemegang saham

Kerangka yang dibangun dalam *Corporate Governance* harus mampu melindungi hak-hak para pemegang saham, termasuk pemegang saham minoritas.

Hak-hak tersebut mencakup hak dasar pemegang saham, yaitu:

- Hak untuk memperoleh jaminan keamanan atas metode pendaftaran kepemilikan;
- Hak untuk mengalihkan atau memindahtangankan kepemilikan saham;
- Hak untuk memperoleh informasi yang relevan tentang perusahaan secara berkala dan teratur;
- Hak untuk ikut berpartisipasi dan memberikan suara dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS);
- Hak untuk memilih dewan komisaris dan direksi;
- Hak untuk memperoleh pembagian laba (*profit*) perusahaan.

2. Perlakuan yang setara terhadap seluruh pemegang saham

Kerangka yang dibangun dalam *Corporate Governance* haruslah menjamin perlakuan yang setara terhadap seluruh pemegang saham, termasuk pemegang saham minoritas dan asing. Prinsip ini melarang adanya praktik perdagangan berdasarkan informasi orang dalam dan transaksi dengan diri sendiri. Selain itu, prinsip ini mengharuskan anggota dewan komisaris untuk terbuka ketika menemukan transaksi-transaksi yang mengandung benturan atau konflik kepentingan.

3. Peranan pemangku kepentingan berkaitan dengan perusahaan

Kerangka yang dibangun dalam *Corporate Governance* harus memberikan pengakuan terhadap hak-hak pemangku kepentingan sebagaimana ditentukan oleh undang-undang dan mendorong kerja sama yang aktif antara perusahaan dengan pemangku kepentingan dalam rangka menciptakan lapangan kerja, kesejahteraan, serta kesinambungan usaha.

4. Pengungkapan dan transparansi

Kerangka yang dibangun dalam *Corporate Governance* harus menjamin adanya pengungkapan yang tepat waktu dan akurat untuk setiap permasalahan berkaitan dengan perusahaan. Pengungkapan tersebut mencakup informasi mengenai kondisi keuangan, kinerja, kepemilikan dan pengelolaan perusahaan.

5. Tanggung jawab dewan komisaris atau direksi

Kerangka yang dibangun dalam *Corporate Governance* harus menjamin adanya pedoman strategis perusahaan, pengawasan yang efektif terhadap

manajemen oleh dewan komisaris dan pertanggungjawaban dewan komisaris terhadap perusahaan dan pemegang saham

Prinsip-prinsip GCG sesuai Pasal 3 Surat Keputusan Menteri BUMN No. 117/M-MBU/2002 Tanggal 31 Juli 2002 tentang penerapan GCG pada BUMN sebagai berikut:

1. Transparansi (*transparency*)

Keterbukaan dalam melaksanakan proses pengambilan keputusan dan pengungkapan informasi materil yang relevan mengenai perusahaan.

2. Pengungkapan (*disclosure*)

Penyajian informasi kepada para pemangku kepentingan, baik diminta maupun tidak, mengenai hal-hal yang berkenaan dengan kinerja operasional, keuangan dan risiko usaha perusahaan.

3. Kemandirian (*independence*)

Suatu keadaan dimana perusahaan dikelola secara profesional tanpa konflik kepentingan dan pengaruh atau tekanan dari pihak manapun yang tidak sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku dan prinsip-prinsip korporasi yang sehat.

4. Akuntabilitas (*accountability*)

Kejelasan fungsi, pelaksanaan serta pertanggungjawaban manajemen perusahaan sehingga pengelolaan perusahaan terlaksana secara efektif dan ekonomis.

5. Pertanggungjawaban (*responsibility*)

Kesesuaian pengelolaan perusahaan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip-prinsip korporasi yang sehat.

6. Kewajaran (*fairness*)

Keadilan dan kesetaraan dalam memenuhi hak-hak pemangku kepentingan yang timbul sebagai akibat dari perjanjian dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2.3.3. Tujuan *Good Corporate Governance*

Menurut Undang-undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, tujuan dari penerapan *Good Corporate Governance* adalah dalam rangka:

1. Mendorong tercapainya kesinambungan perusahaan melalui pengelolaan yang didasarkan pada asas transparansi, akuntabilitas, responsiilitas, independensi, serta kewajaran dan kesetaraan.
2. Mendorong pemberdayaan fungsi dan kemandirian masing-masing organ perusahaan, yaitu Dewan Komisaris, Direksi dan Rapat Umum Pemegang Saham.
3. Mendorong pemegang saham, anggota dewan komisaris dan anggota direksi agar dalam membuat keputusan dan menjalankan tindakannya dilandasi oleh nilai moral yang tinggi dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan.
4. Mendorong timbulnya kesadaran dan tanggung jawab sosial perusahaan terhadap masyarakat dan kelestarian lingkungan terutama di sekitar perusahaan.

5. Mengoptimalkan nilai perusahaan bagi pemegang saham dengan tetap memperhatikan pemangku kepentingan lainnya.
6. Meningkatkan daya saing perusahaan secara nasional maupun internasional, sehingga meningkatkan kepercayaan pasar yang dapat mendorong arus investasi dan pertumbuhan ekonomi nasional yang berkesinambungan.

2.3.4. Manfaat *Good Corporate Governance*

Penerapan *Good Corporate Governance* berdasarkan Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Mengurangi *agency cost*, yaitu suatu biaya yang harus ditanggung pemegang saham sebagai akibat dari pendelegasian wewenang kepada pihak manajemen. Biaya-biaya ini dapat berupa kerugian yang diderita perusahaan sebagai akibat penyalahgunaan wewenang (*wrong doing*), ataupun berupa biaya pengawasan yang timbul untuk mencegah terjadinya hal tersebut.
2. Mengurangi biaya modal (*cost of capital*), yaitu sebagai dampak dari pengelolaan perusahaan yang baik tadi menyebabkan tingkat bunga atas dana atau sumber daya yang dipinjam oleh perusahaan semakin kecil seiring dengan turunnya tingkat resiko perusahaan.
3. Meningkatkan nilai saham perusahaan sekaligus dapat memberikan citra perusahaan di mata publik dalam jangka panjang.
4. Menciptakan dukungan para *stakeholder* (para pemangku kepentingan) dalam lingkungan perusahaan tersebut terhadap keberadaan perusahaan dan berbagai strategi dan kebijakan yang ditempuh perusahaan, karena umumnya mereka

mendapat jaminan bahwa mereka juga mendapat manfaat maksimal dari segala tindakan dan operasi perusahaan dalam menciptakan kemakmuran dan kesejahteraan.

2.3.5. Elemen-elemen dalam *Good Corporate Governance*

1. Dewan Komisaris Independen

Dewan Komisaris (*board of commissioner*) berfungsi untuk melakukan pengawasan. Sementara, Dewan Komisaris Independen (*board of independent commissioner*) berfungsi sebagai kekuatan penyeimbang dalam pengambilan keputusan oleh Dewan Komisaris. Peran Komisaris sangat penting dan cukup menentukan bagi keberhasilan penerapan *Good Corporate Governance*. Diperlukan komitmen dari Dewan Komisaris agar penerapan *Good Corporate Governance* dapat berjalan dengan lancar dan sesuai harapan. Dewan Komisaris Independen dapat diukur dengan rumusan sebagai berikut:

$$DKI = \frac{\sum \text{Dewan Komisaris Independen}}{\sum \text{Komisaris yang ada di Perusahaan}}$$

2. Komite Audit Independen

Ikatan Komite Audit Indonesia (IKAI) mendefinisikan komite audit sebagai berikut:

Suatu komite yang bekerja secara profesional dan independen yang dibentuk oleh dewan komisaris dan dengan demikian, tugasnya adalah membantu dan memperkuat fungsi dewan komisari atau dewan pengawas dalam menjalankan fungsi pengawasan (*oversight*) atas proses pelaporan keuangan, manajemen risiko, pelaksanaan audit dan implementasi dari *corporate governance* di perusahaan-perusahaan.

Surat Edaran dari Direksi PT Bursa Efek Jakarta No. SE-008/BEJ/12-2001

Tanggal 7 Desember 2001 perihal keanggotaan komite audit disebutkan bahwa:

- 1). Komite audit sekurang-kurangnya terdiri atas 3 orang, termasuk ketua komite audit;
- 2). Anggota komite audit yang berasal dari komisaris maksimum hanya satu orang. Anggota komite audit yang berasal dari komisaris tersebut harus merupakan komisaris independen perusahaan tercatat yang sekaligus menjabat sebagai ketua komite audit.
- 3). Anggota komite audit lainnya berasal dari pihak eksternal yang independen. Maksud dari pihak eksternal adalah pihak di luar perusahaan tercatat yang bukan merupakan komisaris, direksi maupun karyawan dari perusahaan tercatat tersebut. Sedangkan, yang dimaksud dengan independen adalah pihak di luar perusahaan tercatat yang tidak memiliki hubungan usaha dan hubungan afiliasi dengan perusahaan tercatat tersebut maupun dengan komisaris, direksi serta pemegang saham utamanya serta mampu memberikan pendapat professional secara bebas sesuai dengan etika professional secara bebas sesuai dengan etika profesionalnya dengan tidak memihak kepada kepentingan siapapun.

3. Kepemilikan Institusional

Menurut Beiner et al. (2003) dalam Yusriati dkk (2010) kepemilikan institusional adalah jumlah presentase hak suara yang dimiliki oleh institusi. Menurut Anggit dan Djoko (2012) kepemilikan institusional dalam pada sebuah perusahaan berpengaruh terhadap keputusan-keputusan yang diambil dalam tiap

periode, karena bisa saja keputusan yang diambil pihak perusahaan akan berdasarkan kemauan dari pihak institusional yang mempunyai kepemilikan lebih besar. Kepemilikan dengan kontrol yang besar dari pihak institusi akan menekan manajerial tidak berusaha untuk mencapai kepentingannya sendiri, dengan demikian akan mengurangi biaya keagenan dan kinerja perusahaan akan maksimal. Kepemilikan institusional dapat dihitung dengan rumus sebagai berikut:

$$KI = \frac{\sum \text{Saham yang dimiliki Institusi}}{\sum \text{Seluruh Modal Saham yang Beredar}}$$

2.4. KinerjaPerusahaan

2.4.1. Pengertian Kinerja

Menurut Irhan (2011:2) mengemukakan bahwa kinerja keuangan adalah suatu analisis yang dilakukan untuk melihat sejauh mana suatu perusahaan telah melaksanakan suatu proses kegiatan dengan baik dan benar. Menentukan kinerja keuangan perusahaan dapat dilakukan dengan cara analisis rasio yang diperoleh berdasarkan data-data yang terdapat pada laporan keuangan yang dikeluarkan perusahaan. Setiap perusahaan akan melakukan penilaian akan kinerja perusahaan secara berkala. Hal tersebut dilakukan untuk mengetahui kondisi kesehatan perusahaan dan sebagai evaluasi manajemen. Selain itu, dengan penilaian kinerja secara berkala sebagai penentuan strategi perusahaan ke depan.

2.4.2. Penilaian Kinerja

Rasio merupakan teknik analisis laporan keuangan yang paling banyak digunakan untuk menilai kinerja perusahaan. Analisis rasio dapat menunjukkan

hubungan sekaligus menjadi dasar pembandingan yang menunjukkan kondisi suatu perusahaan. Dalam hubungannya dengan keputusan yang diambil oleh perusahaan, analisis rasio bertujuan untuk menilai efektivitas keputusan yang diambil oleh perusahaan dalam rangka menjalankan aktivitas usahanya (Dwi, 2011:80). Salah satu analisis rasio yang digunakan untuk menilai kinerja suatu perusahaan yaitu *Ratio Return on Assets dan Economic Value Added*.

1. *Return on Total Assets (ROA)*

Salah satu rasio profitabilitas adalah *Return on Total Assets (ROA)*. ROA merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam memperoleh laba secara keseluruhan (Agnes, 2005:18). ROA mengukur kemampuan perusahaan dalam memanfaatkan aktivasnya untuk memperoleh laba. Terdapat dua faktor yang mempengaruhi besarnya nilai ROA, yaitu:

- 1). Tingkat perputaran aktiva yang digunakan untuk operasi;
- 2). *Profit margin*, yaitu besarnya keuntungan operasi yang dinyatakan dengan presentase penjualan bersih. *Profit margin* menunjukkan tingkat keuntungan yang dapat dicapai perusahaan dihubungkan dengan penjualan.

ROA dapat dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

$$ROA = \frac{\text{Laba Bersih}}{\text{Total Aset}}$$

Keterangan:

Laba bersih : laba bersih setelah pajak dan bunga.

Total aset : rata-rata total aktiva (*assets*) yang diperlukan dari rata-rata total aktiva awal tahun dan akhir tahun.

Semakin besar nilai ROA suatu perusahaan, dikatakan semakin besar pula tingkat laba yang dicapai perusahaan dan semakin baik pula posisi perusahaan tersebut dalam hal aktivitya. Apabila nilai ROA telah diketahui maka perusahaan dapat mengetahui bagaimana keadaan perusahaan dalam setiap periodenya, dilihat dalam hal laba yang diperolehnya. Analisis ROA penting karena dengan mengetahui nilai ROA maka akan terlihat sebagaimana efisien perusahaan menggunakan asetnya untuk melakukan kegiatan operasi dalam memperoleh laba.

2. *Economic Value Added (EVA)*

Economic Value Added (EVA) merupakan salah satu konsep yang ukuran kinerja keuangan yang dikenal pertama kali oleh analis keuangan, Stewart dan Stern pada tahun 2001 dalam usahanya untuk memperoleh jawaban terhadap metode penilaian yang lebih baik. Metode ini dikembangkan dan digunakan karena masih lemahnya pengukuran kinerja tradisional. Selain itu, karena masih ada ketidakpastian dalam pengukuran kinerja dengan metode tradisional. Metode EVA mengukur keuntungan nyata operasi perusahaan. Perbedaan perhitungan EVA dengan metode tradisional adalah digunakannya biaya modal dalam perhitungan. EVA akan meningkat jika laba operasi akan meningkat tanpa diikuti meningkatnya biaya modal.

EVA memberikan beberapa manfaat, antara lain:

- 1). EVA memfokuskan penilaiannya pada nilai tambah dengan memperhitungkan beban biaya modal sebagai konsekuensi investasi;
- 2). Perhitungan EVA relatif mudah dilakukan.

EVA ditentukan oleh dua hal yaitu keuntungan operasional bersih setelah pajak dan tingkat biaya modal (Anton, 2012). EVA dapat dihitung dengan rumus:

$$\mathbf{EVA = NOPAT - Capital Charges}$$

Dimana:

$NOPAT = Net\ Operating\ Profit\ After\ Taxes$

Hasil akhir dari perhitungan EVA dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. $EVA > 0$ (positif), maka telah terjadi penambahan nilai ekonomis ke dalam perusahaan dan perusahaan dapat menciptakan nilai perusahaan.
2. $EVA = 0$ (impas), maka secara ekonomis perusahaan dalam keadaan impas karena semua laba yang ada digunakan untuk membayar kewajiban, atau dengan kata lain laba habis untuk biaya modal.
3. $EVA < 0$ (negatif), maka tidak ada nilai tambah di perusahaan karena dana yang tersedia tidak memenuhi harapan kreditor dan pemegang saham (tidak mampu menutup nilai perusahaan)

Komponen-komponen Perhitungan Economic Value Added (EVA)

1) Net Operating Profit After Taxes (NOPAT)

David & O'Byrne dalam Getereida (2012) berpendapat bahwa NOPAT merupakan laba operasi perusahaan setelah pajak, dan mengukur laba yang diperoleh perusahaan dari operasi berjalan. Secara umum, NOPAT dapat dihitung dengan rumus sebagai berikut:

$$\mathbf{NOPAT = Laba\ Bersih\ setelah\ Pajak + Beban\ Bunga}$$

2) *Invested Capital*

Invested Capital merupakan hutang jangka pendek ditambah hutang jangka panjang ditambah dengan ekuitas. Secara matematis dapat dirumuskan sebagai berikut:

$$\mathbf{Invested\ Capital = Hutang\ Jangka\ Pendek + Hutang\ Jangka\ Panjang + Ekuitas}$$

3) *Weighted Average Cost of Capital (WACC)*

Weighted Average Cost of Capital (WACC) merupakan biaya modal rata-rata setelah pajak dari masing-masing sumber modal yang digunakan oleh perusahaan untuk menganalisis keputusan penganggaran modal terhadap suatu proyek (Getereida, 2012). WACC dapat dihitung dengan rumus sebagai berikut:

$$\mathbf{WACC = \{ D \times rd (1 - T) \} + (E \times re)}$$

Berikut perhitungan komponen-komponen yang digunakan dalam perhitungan WACC:

- Menghitung Tingkat Modal Dari Hutang (D)

$$\text{Tingkat Hutang} = \frac{\text{Total Hutang}}{\text{Total Hutang} + \text{Total Ekuitas}}$$

- Menghitung Biaya Hutang Jangka Pendek (rd)

$$\text{Cost Of Debt} = \frac{\text{Biaya Bunga}}{\text{Total Hutang}}$$

- Menghitung Pajak Penghasilan

$$\text{Tingkat Pajak} = \frac{\text{Beban Pajak}}{\text{Laba Sebelum Pajak}}$$

- Menghitung Tingkat Modal dari Ekuitas (E)

$$\text{Tingkat Modal} = \frac{\text{Total Ekuitas}}{\text{Total Hutang} + \text{Total Ekuitas}}$$

- Menghitung Biaya Modal (re)

$$\text{Cost Of Equity} = R_f + \beta (R_m - R_f)$$

Dimana:

R_f = Tingkat pengembalian bebas resiko

β = Kovarian pengembalian perusahaan terhadap portofolio

R_m = Pengembalian rata-rata saham biasa

4) Menghitung *Capital Charges*

Capital Charges merupakan perkalian dari WACC dengan *Invested Capital*. Secara matematis adalah sebagai berikut:

$$\text{Capital Charges} = \text{WACC} \times \text{Invested Capital}$$

Berdasarkan uraian di atas, dapat diambil kesimpulan bahwa pendekatan *Economic Value Added* (EVA) berfungsi sebagai berikut:

1. Indikator tentang adanya penciptaan nilai suatu investasi
2. Pengukuran kinerja perusahaan dalam kegiatan operasional perusahaan
3. Pendekatan baru yang digunakan untuk mengukur kinerja perusahaan, dengan memperhatikan secara adil hak-hak para pemegang saham/investor.

2.5. Pengaruh *Good Corporate Governance* terhadap Kinerja

Pengukuran terhadap kinerja suatu perusahaan merupakan salah satu alat perusahaan untuk mengetahui kondisi perusahaan baik atau buruk. Secara umum,

kinerja perusahaan digunakan untuk mengukur keefektifan dan keefisienan perusahaan. Apabila dikaitkan dengan teori *Good Corporate Governance*, maka dengan menerapkan *Good Corporate Governance* atau tata kelola perusahaan yang baik, maka akan menggerakkan kinerja perusahaan ke arah yang positif. Setyadi, Fachrurrozie dan Bestari menyatakan pengaruh *Good Corporate Governance* terhadap kinerja sebagai berikut:

Kinerja perusahaan ditentukan sejauh mana keseriusannya dalam menerapkan *Good Corporate Governance*. Perusahaan yang terdaftar dalam skor pemeringkat *Corporate Governance* yang dilakukan IICG telah menerapkan *Good Corporate Governance* dengan baik dan secara langsung menaikkan nilai sahamnya (2014:465)

Penegakan penerapan *Good Corporate Governance* diharapkan memberikan dampak yang positif kepada kinerja perusahaan. Menurut Majalah SWA tahun 2001 dalam Purwani (2010) menyebutkan bahwa terdapat sebanyak 25 perusahaan teratas yang menerapkan *Good Corporate Governance* dengan baik secara tidak langsung menaikkan nilai sahamnya. Secara teori, penerapan *Good Corporate Governance* akan meningkatkan kinerja perusahaan dan mengurangi tingkat kecurangan yang dilakukan oleh dewan untuk menguntungkan dirinya sendiri.

Menurut Xiaonan, et al (2001) dalam Purwani (2010) pemegang saham saat ini sangat aktif dalam dalam meninjau kinerja perusahaan karena menganggap penerapan *Good Corporate Governance* yang lebih baik akan memberikan imbalan yang lebih besar. Budiman (2004) dalam Purwani (2010) mengungkapkan bahwa penerapan EVA sebagai indikator kinerja keuangan

perusahaan sangat sesuai dan mendukung prinsip-prinsip yang terdapat dalam penerapan *Good Corporate Governance*.

2.5.1. Pengaruh Dewan Komisaris Independen terhadap Kinerja Perusahaan

Menurut Budiman, 2004 dalam Anton, 2012 mengungkapkan bahwa penerapan EVA sebagai indikator kinerja sangat sesuai dengan dan mendukung prinsip-prinsip yang terdapat dalam *Good Corporate Governance*, salah satunya adalah Dewan Komisaris Independen. Dewan Komisaris Independen merupakan bagian yang memiliki tugas penting dalam suatu perusahaan. Apabila Dewan Komisaris Independen melakukan tugasnya dengan baik maka dapat dikatakan perusahaan telah berhasil dalam penerapan *Good Corporate Governance* dan akan berdampak kepada kinerja perusahaan. Penilaian kinerja perusahaan lain dapat dinilai dengan menghitung nilai ROA, yaitu dilihat berdasarkan laba yang diperoleh perusahaan. Penilaian ROA dan EVA dapat menggambarkan kinerja yang dicapai perusahaan. Apabila Dewan Komisaris Independen telah menjalankan tugasnya dengan semestisnya maka nilai EVA dan ROA akan menjadi tinggi.

2.5.2. Pengaruh Komite Audit Independen terhadap Kinerja Perusahaan

Komite Audit Independen menjadi kunci penting dalam suatu perusahaan. Apabila Komite Audit Independen telah berjalan dengan baik dan semestinya maka dapat dikatakan suatu perusahaan memiliki tata kelola yang baik (*Good Corporate Governance*). Penerapan *Good Corporate Governance* yang baik akan berdampak pada kinerja perusahaan. Apabila Komite Audit Independen

suatu perusahaan berjalan dengan baik, maka nilai EVA dan ROA akan tinggi. Hal tersebut dikarenakan penerapan *Good Corporate Governance* yang baik akan memberikan dampak positif terhadap kinerja perusahaan.

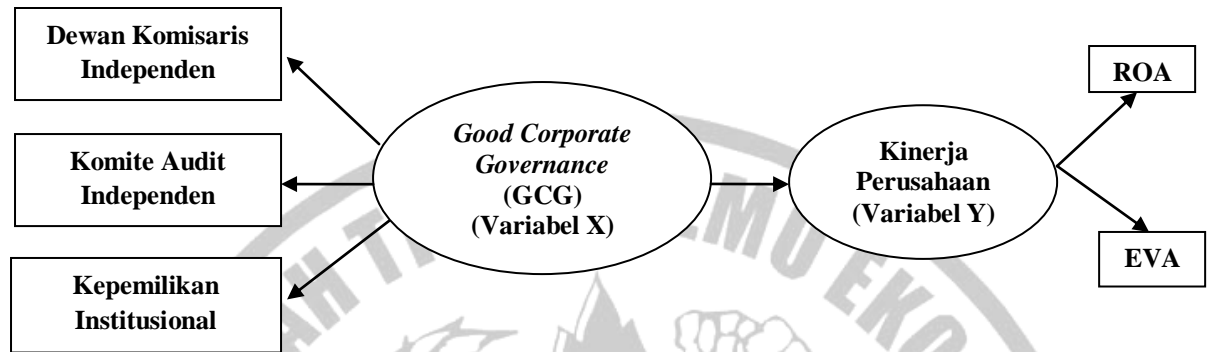
2.5.3. Pengaruh Kepemilikan Institusional terhadap Kinerja Perusahaan

Tingkat kepemilikan institusional yang tinggi akan meminimalisir kemungkinan kecurangan yang akan dilakukan oleh manajerial. Diharapkan dengan tingkat kepemilikan institusional yang tinggi akan memberikan pengaruh yang positif terhadap kinerja perusahaan. Apabila tingkat kepemilikan institusional tinggi maka nilai EVA dan ROA yang menggambarkan kinerja perusahaan juga akan tinggi.

2.6. Kerangka Pemikiran

Penelitian ini bertujuan untuk menguji dan mengetahui pengaruh antara variabel independen yaitu *Good Corporate Governance* yang diproksikan dengan Dewan Komisaris Independen, Komite Audit Independen dan Kepemilikan Institusional dengan variabel dependen yaitu kinerja perusahaan yang diproksikan dengan ROA dan EVA. ROA merupakan rasio keuangan yang berhubungan dengan profitabilitas untuk mengetahui kemampuan perusahaan memperoleh laba dalam tingkat pendapatan, aset dan modal saham tertentu. Penilaian kinerja perusahaan dengan menghitung nilai ROA maka akan dapat menilai tingkat efisiensi perusahaan menggunakan aktiva dalam aktivitas operasinya untuk memperoleh laba. Sementara itu penilaian kinerja dengan perhitungan nilai EVA akan memberikan fokus manajemen pada pemegang saham. EVA dapat

mengidentifikasi kegiatan yang memberikan pengembalian lebih tinggi dari biaya modal.



Gambar 2.1

Kerangka Pemikiran

2.7. **Hipotesis Penelitian**

Hipotesis dalam penelitian ini adalah:

H1 : *Good Corporate Governance* berpengaruh terhadap Kinerja Perusahaan